

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024**



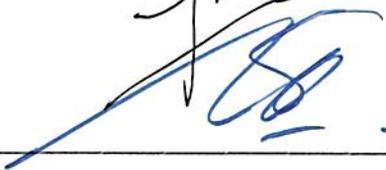
TAHUN 2024

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tanggal 1 April 2024 s.d. 30 Juni 2024	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan II Tanggal 1 April s.d. 30 Juni 2024, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 5 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U2 Dengan Nilai 747; 2. U3 Dengan Nilai 750; 3. U4 Dengan Nilai 752; 	<p>➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.</p>
1	<p>Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi:</p> <p>Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)</p>	<p>> Unsur Pemberian Imbalan Diluar Ketentuan Yang Berlaku merupakan Unsur ke-2 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ? 	<p>Rekomendasi:</p> <p>➤ Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk selalu bekerja sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku;</p>

2	<p>Pemberian Imbalan diluar ketentuan yang berlaku (U3)</p>	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk tidak menerima imbalan apapun diluar ketentuan yang berlaku;
3	<p>Praktik Pungutan Liar (U4)</p>	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-4 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah tersedia akses informasi mengenai tarif/biaya pada website Pengadilan Negeri Palembang ➤ Memberikan kwitansi / Tanda Terima pada setiap layanan yang dikenakan biaya PNBP resmi sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan Ke-II Tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	M. TEGUH,SE.,SH.,MH	Panitera	

Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Anti Korupsi

Point 1



BRIEFING PETUGAS PTSP

Point 2

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
 Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang
 Telpom / fax (0711) 313555 - 383310 Email : pnpalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia ▾
 search...

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

Sistem Informasi Pengawasan
 SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan beritikad buruk yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan.

Kunjungi

LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
 Peraturan dan Kebijakan
 Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Predeo) Posbankum

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA DAN BIAJA PERKARA
 Prosedur Pengajuan Perkara
Biaya Perkara

Awasi dengan SIWAS!

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

BIAYA PERKKARA PADA WEBSITE

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
 Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang
 Telp (0711) 363310-313555 Fax : (0711)313555 Website : www.pn-palembang.go.id
 Email : pnpalembang@gmail.com / pn-palembang@yahoo.com

TANDA TERIMA

Telah terima dari : Riki Karta
 Uang sebesar : Rp. 10.000,- (.....)
 Guna membayar : Pendaftaran Surat Kuasa Akte Notaris Legalisir
 Salinan Putusan Surat Keterangan Warmerking
 Pengesahan Akta dibawah tangan Lain-lain.....

Dengan perincian :

<input checked="" type="checkbox"/> PNPB	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Photocopy @ lembar	: Rp. 300,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-	<input type="checkbox"/> Sampul	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Ongkos Photocopy	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Penyerahan Salinan	: Rp. 500,-	<input type="checkbox"/> Biaya Jilid	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Putusan @ lembar	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/>	: Rp.
<input type="checkbox"/> Leges		<input type="checkbox"/>	
@ Putusan/Penetapan			

Palembang, 01.09.2014
 Petugas Meja Informasi Hukum

KASIR
 (.....)
 NIP.

KWITANSI / TANDA TERIMA BIAYA

Point 3



BRIEFING PETUGAS PTSP